

# IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG EKONOMI DI KANTOR KELURAHAN PANGKALAN MANSYUR KECAMATAN MEDAN JOHOR

Samsul Bahri Pane<sup>1</sup>

Divany Faradiah <sup>2</sup>

<sup>1</sup>Dosen Prodi Ilmu Administrasi Negara FISIP UISU

<sup>2</sup>Alumni Prodi Ilmu Administrasi Negara FISIP UISU

eMail: samsul.bahri@fisip.uisu.ac.id

## Abstrak

*Program Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan program kegiatan usaha yang mampu memperluas dan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan bisa memperluas lapangan pekerjaan, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Peran penting tersebut sudah mendorong Kelurahan Pangkalan Mansyur untuk terus berupaya meningkatkan daya saingnya. Program ini dalam waktu lama diharapkan dapat memutuskan rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi kedepannya akan keluar dari jurang kemiskinan. UMKM adalah program bantuan pemerintah pada saat perekonomian terpuruk sehingga dapat membuat kembali stabil perekonomian dari perputaran usaha tersebut sesuai syarat dan ketentuan yang ditetapkan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana implementasi program pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi yaitu UMKM dalam meningkatkan daya saing UMKM dan dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat lingkungan pangkalan mansyur. Metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik penentuan informan dilakukan secara metode wawancara, observasi, dokumentasi, dan kepustakaan dalam mengumpulkan data untuk mengetahui bagaimana proses, hambatan, dan Implementasi Program Usaha Mikro Kecil Menengah di Kelurahan Pangkalan Mansyur. Adapun informan dalam penelitian ini berjumlah 12 orang, terdiri dari 1 (satu) Lurah, 1 (satu) seklur, kepala lingkungan, 1 (satu) koordinator pelaksana program UMKM, tokoh masyarakat, 3 (tiga) orang penerima bantuan UMKM dan 1 (satu) masyarakat. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa proses Implementasi Program Usaha Mikro Kecil Menengah di Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor sudah berjalan dengan baik, terlihat saat proses kegiatan awal, sosialisasi kepala koordinator, pencairan bantuan, dan keaslian atau pemukhtiran data. Hambatan yang dirasakan dan dihadapi selama pada pelaksanaan UMKM di lapangan, antara lain kurangnya informasi yang tersampaikan pada masyarakat sehingga banyak yang belum mengetahui adanya bantuan ini sehingga menyulitkan koordinator untuk meneruskan informasi tersebut kepada masyarakat, tepatnya yang paling utama dalam mendaftar online dan verifikasi serta pencairan bantuan.*

**Kata Kunci:** Pemberdayaan Masyarakat, Program UMKM, Medan Johor.

## PENDAHULUAN

Program pemberdayaan yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Salah satu program

pemberdayaan ini adalah dengan memberikan bantuan dana bergulir kepada masyarakat, program ini disebut dengan “Program Usaha Mikro Kecil Menengah” namun secara umumnya

disingkat menjadi (UMKM). Dalam Peraturan Walikota Medan Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan. Pasal 5 dalam Peraturan Walikota Medan Nomor 37 Tahun 2019 berisikan tentang Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Keberadaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah ini adalah bagian terbesar dalam perjalanan perekonomian nasional, dari partisipasi masyarakat dalam berbagai sektor, kegiatan perekonomian. Usaha Mikro Kecil Menengah di kelurahan masih terlihat kurang berpengaruh terhadap masyarakat karena belum bersifat menyeluruh, seharusnya UMKM ini dapat terbukti sebagai kutup pengaman dimasa krisis, melalui cara kerja atau bentuk penciptaan lapangan kerja dan nilai tambah, keberhasilan dalam meningkatkan usaha mikro kecil menengah berarti memperkokoh bisnis di masyarakat.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha disemua sektor ekonomi (Tulus Tambunan: 2017). Namun pada umumnya didasarkan pada nilai aset awal omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap. Program ini sudah lama dilaksanakan, meskipun diberberapa kelurahan sudah berhasil dalam melaksanakan program tersebut, terutama di kelurahan pangkalan mansyur ini ada beberapa kelemahan yang perlu dibenahi, misalnya kinerja

pegawai kelurahan yang benar, sistem keikut-sertaan pelatihan yang diadakan, jumlah dana pinjaman untuk modal usaha, maupun pengguna dana pinjaman untuk modal (Andi Alfatih: 2010). Untuk mengharapkan kinerja pemerintah yang baik maka sebelumnya diperlukan kemampuan berupa keahlian yang sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Kegiatan pemberdayaan sudah sangat banyak dilakukan diberbagai daerah baik tingkat kabupaten/kota maupun tingkat desa/kelurahan. Semua itu memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat.

Kelurahan pangkalan mansyur juga mempunyai program pemberdayaan dibidang ekonomi yaitu; pelatihan 2021, desain grafis, sablon digital, membuat aksesoris atau kerajinan tangan, membuat ecobrick dan bimtek UMKM, pelatihan dan peningkatan kapasitas siskamling, gotong-royong, pojok UMKM penting untuk memajukan masyarakatnya seperti peraturan walikota medan nomor 37 tahun 2019 pasal 5 tentang rincian tugas dan fungsi kelurahan yaitu peyusunan bahan pembinaan kegiatan perekonomian sesuai dengan peraturan yang berlaku dan rencana kerja dalam rangka peningkatan kehidupan perekonomian masyarakat. Namun sulitnya program tersebut dijalankan saat ini dikarenakan kondisi Indonesia saat ini terutama di Pangkalan Mansyur.

Desa/kelurahan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat mau tidak mau harus kreatif dalam menjawab hambatan dan tantangan pelaksanaan tersebut. Camat berwewenang untuk mengelola desa/kelurahannya secara

mandiri salah satu caranya ialah lembaga ekonomi yang berada ditingkat desa/kelurahan.

Berdasarkan observasi awal yang diteliti oleh penulis dapat diketahui bahwa kurangnya antusias masyarakat karena cara berpikir masyarakat yang masih sangat sederhana terhadap program pemerintah yang menyangkut di bidang ekonomi. Kemudian tidak tepatnya sasaran dalam pembagian bantuan terhadap masyarakat yang taraf ekonominya cenderung menengah ke bawah. Begitu pentingnya program pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi hingga menjadi salah satu permasalahan di kelurahan. Rendahnya tingkat kepedulian kelurahan terhadap keadaan ekonomi masyarakat, banyak yang menganggap daerah kelurahan Pangkalan Mansyur merupakan pemukiman masyarakat elit sehingga dianggap taraf perekonomian masyarakatnya cukup baik. Sementara dilapangan tidak semua yang tinggal dipemukiman daerah kelurahan Pangkalan Mansyur memiliki taraf ekonomi yang baik, masih banyak masyarakat yang memerlukan bantuan dari pemerintah.

Pentingnya penyuluhan kepada masyarakat mengenai program tersebut dikarenakan selama ini masyarakat yang kurang paham alur penerimaan yang berdasarkan dari data dinas sosial. Banyak sekali terjadi kecurangan dalam penerimaan bantuan misalnya seperti masyarakat yang taraf ekonominya baik justru malah mendapatkan bantuan yang seharusnya itu tidak menjadi bagiannya. Dalam program pemerintah ini membuat dampak yang cukup terlihat yakni kurang maksimalnya dalam

mendata masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. Alasan inilah yang akhirnya menurut penulis perlu diteliti.

## **METODE**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Dipilihnya pendekatan kualitatif dalam penelitian ini didasarkan pada alasan permasalahan yang dikaji didalam penelitian ini yaitu analisa Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor ini memerlukan sejumlah data lapangan yang bersifat actual dan konseptual. Disamping itu, pendekatan kualitatif lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh Bersama terhadap pola pola nilai yang dihadapi dan situasi yang berubah-ubah selama penelitian berlangsung.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif penelitian kualitatif yaitu, penelitian yang tidak menggunakan perhitungan (Sugiono: 2014). Penelitian kualitatif menurut Sukmadinata yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok. Lokasi dalam penelitian ini adalah Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Provinsi Sumatera Utara. Informan adalah subyek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena/permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

Dalam penelitian kualitatif, informan terbagi menjadi tiga yaitu: Informan kunci, Informan utama, Informan Pendukung.

Informan kunci adalah informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Informan kunci bukan hanya mengetahui tentang kondisi/fenomena pada masyarakat secara garis besar, juga memahami informasi tentang informan utama. Dalam pemilihan informan kunci tergantung dari unit analisis yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi informan kuncinya adalah 2 (dua) orang pendamping pelaksana Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, yaitu Bapak Rivai Ramadhan Harahap, S.Si, M.A.P dan Ibu Siti Zahara, S.E

Informan utama adalah orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang akan dipelajari. Informan utama dalam penelitian ini adalah 3 (tiga) orang masyarakat penerima layanan program pemberdayaan masyarakat (UMKM) yaitu ibu Lestari Rokiyah, ibu Refnalia Ambarwaty, dan bapak Parlomoan Hasibuan. Dan Kepala Lingkungan I yaitu Bapak Nurman S.

Informan pendukung merupakan orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian kualitatif. Informan tambahan terkadang memberikan informasi yang tidak diberikan oleh informan utama atau informan kunci. Informan tambahan dalam penelitian ini adalah Kepala Koordinator pelaksana Program

Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Ekonomi yaitu, ibu Adriana Tarigan.

Teknik Pengumpulan Data menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi, dan kepustakaan. Analisis data merupakan langkah yang terpenting untuk memperoleh temuan-temuan hasil penelitian. Analisis data yaitu proses pengumpulan data agar dapat ditafsirkan. Analisis data dilakukan pada saat mengumpulkan data dan setelah pengumpulan data.

Metode analisis kualitatif yaitu metode yang bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis (Adi Riyadi: 2004). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah pengumpulan data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan subjek penelitian yang terdiri tiga informan yaitu , lurah yang selaku informan kunci sebagai pembuat kebijakan, kepala lingkungan sebagai informan utama yaitu sebagai bahan pokok pembahasan yang merupakan perpanjangan tangan lurah dalam melaksanakan kebijakan, kemudian masyarakat lingkungan I sebagai informan tambahan yang melihat bagaimana peran kepling dalam mengurus lingkungannya. Sesuai dengan pembahasan penulis memakai teori Edward III, George ada 4 struktur yang menjadikan implementasi yang baik,yaitu:

1. Komunikasi

Komunikasi dalam implementasi program pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi sudah berjalan cukup baik, sehingga masyarakat merasakan dampaknya seperti yang dikatakan oleh Rivai Ramadhana Harahap, S.Si, M.A.P pada Selasa, 10 Mei 2022 jam 10.00 wib :

*“Implementasi program tersebut dari sisi komunikasi secara pribadi saya itu sudah baik dan tersalurkan dengan benar dari kelurahan ke kapling maupun dari kepling ke masyarakat di lingkungannya masing-masing. Banyak juga kegiatan yang kami lakukan dari program ini terutama di bidang ekonomi UMKM dan implementasikan sesuai kebutuhan masyarakat yang memberikan dampak baik buat perekonomian sekitar”.*

Dalam mengkomunikasikan program pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, maka dari pihak kelurahan pangkalan mansyur melakukan kegiatan sosialisasi tentang UMKM guna memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang penggunaan dana UMKM dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat seperti yang disampaikan oleh Adriana Tarigan hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022 pukul 14.00 wib:

*“Kegiatan yang dilakukan pihak kelurahan salah satunya adalah dilakukannya sosialisasi dikalangan masyarakat pada tahun 2021 sudah 5 kali kegiatan dilakukan dan pada tahun sudah 1 kali dilakukannya kegiatan tersebut dilakukan”.*

Sehubungan dengan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak kelurahan pangkalan mansyur ternyata belum merata karena masih ada masyarakat yang tidak mendapatkan sosialisasi sehingga masyarakatnya tidak tahu tentang kapan harus daftar dan mendapatkan bantuan tersebut seperti yang disampaikan oleh Ibu Lia dalam wawancara pada hari Kamis 16 Juni 2022 pukul 14.00 wib:

*“Kami masih belum mendapatkan sosialisasi, mungkin sebagian sudah dapat sosialisasi yang dilakukan pak lurah. Belum ada pemberitahuan tentang bantuan UMKM ini juga jadi saya juga gak tau harus kapan daftar dan dapat bantuannya”.*

## 2. Sumber Daya

Program UMKM adalah program yang memberikan bantuan secara tunai kepada masyarakat yang dianggap tarif kehidupannya rendah maupun yang pantas menerimanya yang ingin membuat kegiatan agar menjadi pendapatan lingkungan serta dirinya sendiri sehingga dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakatnya, namun didalam menjalankan bantuan UMKM ini harus dilakukan dengan adanya Sumber Daya, seperti yang dikatakan Adriana Tarigan:

*“Program ini namanya UMKM ya nak, program ini sudah lama berjalan sejak 2021 dan bantuan dari ini berupa uang tunai kepada masyarakat yang dianggap kurang mampu maupun maaf yang memiliki usaha dan ada juga yang ingin meningkatkan usahanya di lingkungan Pangkalan Mansyur ini yang memenuhi kriteria penerima*

*bantuan tersebut dikarenakan memiliki syarat dan ketentuannya dan untuk secara sumber daya manusia nya sudah cukup baik dalam menjalankan program tersebut ya nak, seperti pak lurah, bu seklur, kepala koordinasi, kepala seksi dan juga para kepling yang ada”.*

Untuk mendapatkan BLT BPUM UMKM ini, calon penerima bantuan harus diusulkan oleh lembaga pengusul yang terdiri dari:

- 1) Dinas yang yang membidangi Koperasi dan UKM
- 2) Koperasi yang telah disahkan sebagai Badan Hukum
- 3) Kementerian/Lembaga
- 4) Perbankan dan perusahaan pembayaran yang terdaftar di OJK

Adapun syarat bagi pelaku UMKM agar mendapatkan BLT BPUM ini adalah:

- 1) WNI
- 2) Mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK)
- 3) Memiliki usaha mikro
- 4) Bukan ASN, TNI/Polri serta Pegawai BUMN/BUMD
- 5) Tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan dan KUR
- 6) Bagi pelaku usaha mikro yang memiliki KTP dan domisili usaha yang berbeda, dapat melampirkan Surat Keterangan Usaha (SKU).

Melalui program bantuan berbasis UMKM yang mengutamakan para usaha kecil agar dapat

mengembangkan usahanya ataupun yang mempunyai rencana untuk membuat usaha namun belum mampu untuk mewujudkannya dikarenakan sumber daya. Hal tersebut disampaikan oleh Lurah yaitu Rivai Ramadhana Harahap hari jum'at tanggal 17 juni 2022 jam 11.00 wib:

*“Saya pernah menangani langsung terkait pelaksanaan UMKM ini, dan itu termaksud dari sisi masyarakatnya itu sendiri yang membuat data menjadi tidak sinkron ke pusat, saya beri contoh si bapak A sebelum menerima bantuan dia memiliki usaha gorengan namun setelah menerima bantuan dia mengganti usaha menjual es segar dan adapun masyarakat yang sudah menerima bantuan namun tidak dipakai untuk usahanya. Sehingga sumber daya yang saya maksud adalah sumber daya manusianya itu sendiri”.*

Kinerja pegawai pemerintah sudah memiliki standardnya tersendiri. Namun, masih banyak yang merasa kurangnya sumber daya manusia di kantor kelurahan pangkalan mansyur tergolong santai dan hanya sedikit yang memperdulikan kinerjanya. Adapun hal ini disampaikan oleh masyarakat pangkalan mansyur yaitu Ibu Amelia hari jum'at tanggal 17 juni 2022 pukul 15.00 wib:

*“Saat saya mengurus beberapa keperluan di kantor kelurahan ini saya tidak sengaja melihat tentang bantuan UMKM, saat itu saya menanyakan karena saya tidak mendapatkan*

*informasi tentang hal ini, sehingga saya merasa sumber daya manusia (SDM) masih kurang dalam pengelolaan program bantuan UMKM ini”.*

### 3. Sikap Birokrasi dan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan

Program pemerintah dalam mensukseskan UMKM di kelurahan pangkalan mansyur sudah mulai di kerjakan sejak 2021. Proyek ini sangat membantu dalam mensejahterakan usaha. Hal tersebut disampaikan oleh Seklur, Siti Zahara, S.E, Kamis tanggal 12 Mei 2022 jam 11.00 wib.

*“Dalam pelaksanaan program ini memang harus memiliki sikap birokrasi yang baik dan terarah juga pelaksanaan system pemerintah yang terstruktur serta mengikuti arahan pemerintah pusat. Dari penilaian saya sikap biokrasi di kantor kelurahan pangkalan mansyur ini sudah sesuai semestinya dan untuk pelaksanaan system pemerintahnya juga sudah sesuai aturan dari pemerintahnya tanpa mengurangi ataupun menambahkan”.*

Pelaksanaan system pemerintahan dan sikap birokrasi di kantor kelurahan sangat diperhatikan oleh masyarakat umum, terlebih dalam hal bantuan UMKM kepada masyarakat yang dapat menjadi sorotan dan menjadi penilaian masyarakat dalam kinerja kelurahan berdasarkan pelaksanaan atau disebut juga dengan implementasi berdasarkan yang dikatakan masyarakat pangkalan mansyur, Bapak

Parlomoan hari Senin tanggal 13 Juni 2022 pukul 13.00 wib:

*“Menurut saya untuk pelaksanaan sistem pemerintahan dan sikap nya dalam bantuan ini untuk masyarakat sudah termasuk baik sih karena lumayan banyak yang mendapatkan informasi dan mendaftarkan bantuan UMKM, dan kinerja kelurahan pangkalan mansyur terutama Bapak Lurah yang terjun langsung dalam pelaksanaan pembagian bantuan ini. Seluruh pegawai kelurahan juga sudah melakukan pelayanan yang baik dan benar sesuai aturan pemerintah”.*

### 4. Struktur Organisasi

Implementasi yang berhasil pasti akan memiliki struktur organisasi yang telah menjadi syarat ketentuannya. Adapun yang telah disampaikan oleh Bapak Rivai Ramadhana Harahap tanggal 16 juni 2022 hari kamis jam 14.00 wib.

*“Seperti yang saya sampaikan kemarin, implementasi itu penting untuk dijalankan secara terstruktur. Kantor kelurahan ini juga jelas memiliki struktur organisasi yang jelas dan terstruktur, kamu juga sudah melihatnya karena terlihat jelas terpampang”.*

Tak terlepas pula birokrasi dengan adanya struktur organisasi yang dapat membuat dampak baik/buruk nya suatu implementasi pemerintahan, terlebih lagi dalam hal pelaksanaan bantuan bergulir (UMKM) yang saat ini sedang berjalan di kantor kelurahan

Pangkalan Mansyur. Menurut Ibu Siti Zahara sebagai sekur pada tanggal 16 Juni 2022 hari Kamis pukul 10.00 wib:

*“Struktur organisasi ya? Kamu juga bisa melihat langsung bagaimana struktur organisasi di pangkalan mansyur apalagi dalam melaksanakan program bantuan UMKM ini. Struktur organisasi juga bisa membuat implementasi terlihat baik atau buruknya di pemerintahan dan menurut saya pribadi ya kalau ditanya tentang struktur organisasi saat ini dikantor kelurahan ini sudah baik dan terarah dengan benar serta sesuai peraturan pemerintah”.*

#### 5. Hambatan – Hambatan Dalam Pelaksanaan Program UMKM

Setiap program yang dibuat oleh pemerintah akan mengalami hambatan atau permasalahan tersendiri saat menjalankannya dari sudut masyarakatnya sendiri maupun pusat. Begitu yang dirasakan oleh kelurahan pangkalan mansyur dalam menjalankan pelaksanaan program UMKM seperti yang dijelaskan koordinator pelaksanaan program UMKM oleh Ibu Adriana Tarigan tanggal 18 mei 2022 pukul 11.00 wib.

*“Kalau bahas hambatan ya bisa di bilang lumayan nak apalagi hambatan dari masyarakatnya sendiri misalnya itu kurangnya pengetahuan tentang cara mengembangkan usaha, kurangnya ide produk, Masih rendahnya kualitas SDM pelaku usaha, banyak yang belum memahami pemasaran digital, adanya usaha namun kurangnya*

*informasi mengenai bantuan tersebut. Kalau dari segi pemerintahnya paling umum nik masyarakatnya nya tidak terdaftar di pusat sehingga bantuan tidak dapat dicairkan, tempat usaha tidak sesuai alamat ktp nya, sudah memasuki batas waktu pencairan, dan masih banyak lagi lah”*

Untuk pelaksanaan bantuan melalui program UMKM masih banyak yang belum mengerti bahwasanya hambatan itu terjadi karena kurangnya pengetahuan tentang bantuan tersebut seperti syarat yang berlaku untuk mendaftar dan juga dana yang belum cair serta kurangnya SDM untuk mengkoordinasikan bantuan tersebut kepada masyarakat seperti yang dikatakan oleh ketua kelompok UMKM yaitu Ibu Lestari Rokiyani hari selasa tanggal 24 mei 2022 pukul 13.25 wib:

*“Saat ingin mendapatkan bantuan ini banyak masyarakat yang ingin ikut serta namun tidak banyak yang mengetahuinya terutama saat mengurus di kantor kelurahan dan juga saat melakukan pendaftaran online di hp, sumber daya manusia (SDM). Itu yang saya ketahui saat ada hambatan bagian UMKM pada kami”.*

#### KESIMPULAN

Kesimpulan yang dari penelitian ini adalah implementasi program UMKM di Pangkalan Mansyur kecamatan Medan Johor sudah sangat berjalan baik dan dengan ketentuan yang berlaku, walaupun masih ada beberapa yang belum mendapatkan bantuan dan juga masih ada penerima bantuan yang



masih belum tepat sasaran. Fasilitas yang telah disediakan dan juga sikap birokrasi pelaksanaan system sudah tergolong cukup baik yang membuat program ini berjalan baik dan terarah. Adapun juga yang membuat terasa adanya manfaat yang dirasakan oleh masyarakat baik dalam bidang ekonomi maupun bidang pendidikan. Dengan adanya bantuan UMKM ini maka pada bidang ekonomi sangat terlihat perubahan saat masyarakat memanfaatkan bantuan tersebut, maka akan terjadinya peningkatan pertumbuhan tarif ekonomi masyarakat itu maupun masyarakat pangkalan masyur. Karena masyarakat yang menerima bantuan tersebut akan mengembangkan usahanya secara personal maupun kelompok ataupun yang belum memiliki modal untuk memiliki usaha yang lebih baik maka akan terwujudkan sedikit demi sedikit sehingga akan meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat.

Perputaran ekonomi pun akan berjalan baik dan sinkron. Dan untuk bidang pendidikan dengan adanya bantuan UMKM ini maka orang tua yang awalnya kesulitan untuk menyekolahkan atau pun membayar biaya sekolah anak-anaknya akan terbantu. Karena jika usaha mereka meningkat maka pendapatan mereka juga akan meningkat sehingga untuk soal masalah pendidikan anaknya akan lebih mudah dan anak-anak lingkungan pangkalan masyur mendapatkan pendidikan yang lebih baik dan terjamin karena sudah ada biayanya.

Namun untuk proses ini terdapat pula kendala-kendala yang dihadapi oleh pelaksana UMKM secara langsung atau di lapangan, yaitu antra lain seperti partisipasi masyarakat yang kurang,

kurang mengertinya masyarakat terhadap digital untuk mendaftar terhadap bantuan, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pelaksana bantuan, keterlambatan informasi yang diberikan pusat terhadap kelurahan, maupun saat pencairan dana, serta para pendamping pelaksana dalam mengimplementasikan program tersebut kepada masyarakat.

Untuk bagian implementasi program yang diberikan koordinator terhadap masyarakat penerima bantuan di kelurahan pangkalan masyur sudah terhitung cukup baik karena dilihat dalam aspek yang berbeda seperti aspek bukti fisik yang bahwasanya untuk sarana dan prasarana perekonomian ( usaha ) dan pendidikan yang sudah cukup memadai, dan dalam aspek kehandalan, pendamping atau koordinator sudah cukup handal dan juga tepat waktu, kemudahan dalam mengurus surat-surat untuk melengkapi syarat bantuan juga mudah, namun untuk pendaftaran online masih kurang di sosialisasikan karena masih dikategorikan banyak yang bingung untuk menggunakan pendaftaran secara online. Untuk aspek jaminan sudah cukup optimal implementasiannya, koordinatornya juga bertanggung jawab dalam penanggapan dari keluhan penerima bantuan.

#### **DAFTAR BACAAN**

- Aan Komariah, Djam'an Satori (2011).  
Metode Penelitian Kualitatif.  
Bandung, Alfabeta
- Abdul Wahab, Solichin. (2008).  
Pengantar Analisis Kebijakan  
Publik. Malang: Universitas  
Muhammadiyah Malang Press

- Abu Huraerah, (2001). Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat, Bandung : Humaniora.
- Adi, Isbandi Rukminto. (2013). Intervensi dan Komunitas dan Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Alfatih, Andy. (2010). Implementasi Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat. Bandung: Unpad Press
- Anoraga, Pandji. (2010) Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro. Yogyakarta: PT Dwi Candra Wacana
- Anwas, Oos M. (2014). Pemberdayaan Masyarakat di Era Global. Bandung: ALFABETA
- Balilatfo. (2019). Inovasi Pengelolaan dan Pengelolaan Produk Unggulan Berbasis Ekonomi Digital di Daerah Tertinggal. Cetakan Pertama, 2019
- Bungin, Burhan (2003). Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Eni Suharti. (2008). Undang-undang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah UMKM. Jakarta: Sinar Grafika
- Farida Yusuf Tayipnapi. (2000). Evaluasi Program. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Lexy J. Moeleong. (2006). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mazmanian, Daniel A and Paul A. Sabatier, (1983). Implementation and Public Policy, Scott Foresman and Company, USA
- Mestika Ze. (2004). Metode Penelitian Kepustakaan, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Nurdin Usman,(2002). Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Bandung: CV Sinar Baru
- Partomo, Tiktik Sartika dan Rachman Soejoedono. (2004). Ekonomi Skala Kecil / Menengah & Koperasi.Jakarta: Ghalia Indonesia
- Oemar Hamali. (2007). Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Riyadi. (2004). Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum. Jakarta: Granit
- Rohman, Arif. (2009). Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan. Yogyakarta: Laksbang Mediatama
- Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Sumaryadi, I Nyoman. (2005). Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: CV. Citra Utama
- Sumodiningrat, Gunawan (2009) Membangun Perekonomian Rakyat, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Supardi. (2005). Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis. Yogyakarta: UII Press.

Winarno, Budi. (2002). Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo.